JBEP : Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak
Volume 3, Nomor 2, Juni 2026
E-ISSN : 3046-9864; P-ISSN : 3046-9880; Hal 91-110
DOI: https://doi.org/10.61132/jbep.v3i2.2374
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP

Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Yogyakarta: Analisis Gini Ratio dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dita Tasya Ramadhanty[1*], Cintya Aura Paramita[2], Budi Jaya Putra[3]
[1-3] Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
Email: ditatasya.rdhy@gmail.com [1], cintyaauraprmta@gmail.com [2], budi.putra@lpsi.uad.ac.id [3]*

**Penulis Korespondensi: ditatasya.rdhy@gmail.com*

Abstract. *Income inequality remains a persistent issue in economic development in the Special Region of Yogyakarta (DIY), despite the region's relatively strong economic growth. This study aims to examine the level of income inequality using the Gini Ratio as an indicator, investigate its relationship with the development of district/city minimum wages (UMK) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth, and analyze it from the perspective of Islamic economics. Employing a quantitative descriptive approach and secondary data obtained from the Statistics Indonesia of Yogyakarta (BPS DIY) for the period 2021–2025, the analysis was conducted through the presentation of tables, graphs, and interpretations based on income distribution theory and Islamic economic principles. The findings indicate that the Gini Ratio in DIY remained within the medium-to-high inequality category throughout the observation period, although it showed a declining trend toward the end of the period. Meanwhile, increases in UMK and GRDP growth have not significantly reduced income inequality. From the perspective of Islamic economics, this condition suggests that the principles of distributive justice (al-'adl), balance (tawazun), and welfare (falah) have not been fully achieved. Therefore, more inclusive development policies and the strengthening of Islamic economic distribution instruments are needed to promote a more equitable distribution of welfare among society.*

Keywords*: Gini Ratio; Income Inequality; Islamic Economics; Minimum Wage; Social Welfare.*

Abstrak. Ketidakmerataan dalam pendapatan terus menjadi isu dalam pembangunan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) walaupun kawasan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat ketidakmerataan pendapatan melalui indikator Gini Ratio, meninjau hubungannya dengan perkembangan UMK dan pertumbuhan PDRB, serta menganalisisnya dari sudut pandang ekonomi Islam. Dengan memanfaatkan metode deskriptif kuantitatif dan data sekunder dari BPS DIY pada periode 2021–2025, analisis dilalukan melalui penyajian tabel, grafik, dan interpretasi berdasarkan teori distribusi pendapatan dan prinsip ekonomi Islam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Gini Ratio di DIY masih tergolong dalam kategori ketidakmerataan menengah hingga tinggi walaupun menunjukkan penurunan di akhir periode. Sementara itu, peningkatan UMK dan pertumbuhan PDRB belum mampu secara signifikan mengurangi ketidakmerataan tersebut. Dari perspektif ekonomi Islam, situasi ini mengindikasikan bahwa prinsip keadilan distribusi (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kesejahteraan (falah) belum sepenuhnya terwujud secara maksimal, oleh karena itu diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan penguatan alat distribusi berdasarkan ekonomi Islam.

Kata kunci: Ketidaksetaraan Pendapatan; Kesejahteraan Sosial; Ekonomi Islam; Rasio Gini; Upah Minimum.

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menjadi salah satu tantangan yang masih signifikan dalam upaya pembangunan ekonomi, terutama di negara yang masih tingkat berkembang seperti Indonesia (Khoiri et al., 2020). Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut aspek perekonomian semata, melainkan dengan merefleksikan tingkat keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah suatu daerah yang menarik untuk ditelaah karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, tetapi masih menghadapi tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi (Sholikah &

Naskah Masuk: 21 April 2026; Revisi: 29 Mei 2026; Diterima: 28 Juni 2026; Terbit: 30 Juni 2026

Imaningsih, 2022). Berdasarkan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan, nilai Gini Ratio Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam beberapa tahun terakhir tercatat berada pada kisaran 0,43 hingga 0,44. Angka tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di wilayah tersebut masih belum merata. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pihak yang mempunyai penghasilan tinggi dan pihak berpenghasilan rendah.

Fenomena ini tercermin dari pesatnya perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua sektor tersebut telah menjadi motor utama perekonomian daerah serta memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Hakami, 2024).Meskipun demikian, manfaat yang timbul dari pertumbuhan sektor-sektor itu belum sepenuhnya dinikmati secara adil oleh semua lapisan masyarakat. Di samping itu, masih terdapat sejumlah tenaga kerja yang memperoleh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang tergolong relatif rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup, khususnya untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya . (Sholikah & Imaningsih, 2022) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa DIY termasuk daerah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi yang berlangsung belum sepenuhnya mampu menwujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB, UMK, Gini Ratio Provinsi DIY.

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi DIY (%)	Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi di DI Yogyakarta (Rupiah/Bulan)	Gini Ratio (%)
2021	5,58	1.765.000	0,441
2025	5,49	2.264.080	0,420

Sumber:Badan Pusat Statistik, data diolah

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan di DIY belum berjalan secara seimbang. Meskipun PDRB terus mengalami peningkatan dan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif terlihat dari data dari 5,58% ditahun 2021 menjadi 5,49% pada tahun 2025, perbaikan distribusi pendapatan masih berlangsung secara terbatas. Penurunan nilai Gini Ratio yang terjadi belum mampu mencerminkan perubahan yang berarti dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat daerah belum sepenuhnya selaras dengan peningkatan pemerataan hasil pembangunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menjamin penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, pemerintah daerah secara bertahap menaikkan UMK di DIY dari Rp1.765.000 pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp2.264.080 pada tahun 2025. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan pekerja. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan secara nominal, hal tersebut belum tentu diiringi oleh perbaikan kesejahteraan secara riil, mengingat biaya hidup juga mengalami kenaikan setiap tahun. Akibatnya, daya beli masyarakat tidak selalu meningkat seiring dengan bertambahnya upah yang diterima (Angraeni & Saiful, 2025). Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam guna memahami bagaimana struktur perekonomian daerah, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat.

Sejumlah penelitian yang dilakukan sebelumnya menjelaskan banyak faktor yang bisa memiliki pengaruh kesenjangan pendapatan di Yogyakarta. (Rosaline et al., 2024) studi tersebut menjelaskan jika ketimpangan memiliki kaitan erat dengan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, temuan (Rasyidi & Soesilo, 2021) menunjukkan bahwa faktor seperti PDRB, pendidikan, dan struktur ekonomi menjadi variabel yang mempengaruhi tingkat ketimpangan. Meskipun demikian, mayoritas studi yang telah ada masih menggunakan pendekatan ekonomi konvensional yang menekankan pada analisis indikator-indikator ekonomi kuantitatif. (Taufiq et al., 2025) dalam penelitiannya yang mengintegrasikan dimensi sosial, moral, dan nilai-nilai keagamaan dalam mengkaji permasalahan ketimpangan masih tergolong terbatas, sehingga memberikan ruang bagi dilakukannya penelitian yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang dapat dikembangkan, khususnya dalam mengkaji ketimpangan pendapatan melalui perspektif ekonomi Islam (Karimullah, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis tingkat ketidakmerataan pendapatan di DIY dengan mengombinasikan pendekatan Gini Ratio dan perspektif ekonomi Islam. Melalui Melalui pendekatan tersebut, ketimpangan tidak hanya dipahami sebagai permasalahan ekonomi, melainkan menjadi sebuah persoalan sosial dan moral yang terkait dengan perwujudan keadilan dalam distribusi kesejahteraan. Pendekatan ini memberikan nilai tambah sekaligus menjadi unsur kebaruan penelitian jika dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada analisis ekonomi konvensional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan kajian ekonomi Islam, terutama yang terkait dengan pengembangan wilayah.

Keunggulan pada kajian ini terletak pada integrasi antara analisis empiris dan nilai-nilai normatif Islam dalam mengkaji persoalan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengapa Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikenal sebagai wilayah dengan karakter masyarakat religius dan budaya yang kuat, masih mengalami tingkat ketimpangan ekonomi yang relatif tinggi. (Ananda et al., 2025) dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan harus dilaksanakan secara merata agar tidak terfokus hanya pada kalangan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. Berlandaskan kerangka pemikiran tersebut, tujuan penelitian iniuntuk mengkaji tingkat ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui indikator Gini Ratio dan mengevaluasinya dari sudut pandang ekonomi Islam. Temuan penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih adil, inklusif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan Ekonomi

Distribusi pendapatan merupakan mekanisme pembagian pendapatan yang diperoleh individu atau kelompok masyarakat sebagai produk dari kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Variabel ini kerap digunakan sebagai bagian dari ukuran untuk mengevaluasi pada tingkat kesejahteraan penduduk di sebuah daerah. Apabila pendapatan dapat dialokasikan secara lebih seimbang, maka manfaat pembangunan ekonomi akan dinikmati oleh lebih banyak lapisan masyarakat. (Ardiani & Prabowo, 2024) menjelaskan bahwa pemerataan distribusi pendapatan memainkan peran krusial dalam usaha memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kesenjangan ekonomi yang terjadi antarkelompok penduduk. Temuan yang dikemukakan oleh (Andrianto & Setyowati, 2025) menjelaskan ketimpangan dalam distribusi pendapatan turut dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi dan sosial, sehingga menjadikannya sebagai isu yang signifikan dalam konteks pembangunan daerah.

Theory Kuznets mengemukakan jika tahapan awal proses pembangunan, tingkat ketidakmerataan pendapatan cenderung mengalami kenaikan, disebabkan oleh konsentrasi manfaat dari pertumbuhan ekonomi pada kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses terhadap modal, teknologi, serta peluang usaha. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan perekonomian dan meluasnya akses masyarakat terhadap berbagai kesempatan ekonomi, tingkat ketimpangan tersebut perlahan menurun. (Yusuf et al., 2021) mengemukakan bahwa perubahan struktur ekonomi di Indonesia berkaitan dengan perubahan tingkat ketimpangan pendapatan, sehingga memperkuat relevansi hipotesis Kuznets dalam konteks pembangunan

daerah di Indonesia . Temuan tersebut didukung oleh (Asman et al., 2024) yang menunjukkan bahwa perubahan struktur ekonomi di tingkat daerah dapat memengaruhi besarnya ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah.

Konsep gini ratio mampu memberikan gambaran yang jelas Mengenai tingkat kesenjangan distribusi pendapatan, baik antarindividu maupun antarwilayah. Hal serupa juga dikemukakan oleh (Daffa & Wahyu, 2024) yang menggunakan gini ratio sebagai alat ukur utama dalam menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan demikian, gini ratio dalam penelitian ini ditetapkan sebagai variabel dependen karena mampu mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan di DIY secara lebih komprehensif.

Ketimpangan pendapatan tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan berbagai konsekuensi sosial. (Makipantung et al., 2023) menjelaskan bahwa tingginya ketimpangan pendapatan dapat membatasi peluang masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan serta layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, (Fatihurroyyan & Wildana, 2024) menemukan bahwa berbagai faktor kelembagaan dan tata kelola pemerintahan turut memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Di sisi lain, (Fatonah & Sebayang, 2024) mengemukakan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat menjadi upaya untuk menekan tingkat ketimpangan serta mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata. Dengan demikian, pengurangan ketimpangan pendapatan menjadi sasaran strategis pembangunan ekonomi daerah guna menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Etika Ekonomi Islam: Adl, Ihsan, dan Ujrah al-Mithl

Dalam ekonomi islam, sistem perekonomian memiliki landasan pada prinsip syariah dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Berbeda dengan teori ekonomi lainnya yang hanya menitikberatkan pada perolehan laba dan pertumbuhan ekonomi, ekonomi Islam juga mengedepankan pentingnya nilai-nilai moral, etika, serta tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan ekonomi. (Ayu & Suryadi, 2025) mengemukakan bahwa distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam tidak semata-mata dipahami sebagai sebagai mekanisme pembagian hasil ekonomi, melainkan juga sebagai perwujudan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.

Pada ekonomi islam, disebutkan prinsip fundamental salah satunya yaitu konsep berkeadilan atau *'adl*. Dalam pandangan Islam, keadilan tidak semata-mata dimaknai sebagai perlakuan yang seragam terhadap seluruh individu, melainkan juga sebagai pemberian hak kepada setiap orang berdasarkan kondisi, kebutuhan, serta kontribusinya. (Maulidya et al.,

2025) mengemukakan bahwa gagasan keadilan distributif dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menekan ketimpangan ekonomi melalui alokasi sumber daya dan pendapatan yang lebih proposional. Prinsip ini secara tegas menolak konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Jalianty et al., 2026) menegaskan bahwa prinsip keadilan (‘adl) memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pemerataan kesejahteraan serta menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di tengah masyarakat.

Selain prinsip keadilan, ekonomi Islam juga mengenal konsep ihsan, yang merujuk pada tindakan melakukan kebaikan secara sukarela yang melampaui batas kewajiban seseorang. (Zuraidah, 2013) menjelaskan bahwa Islam mendorong masyarakat untuk menyalurkan sebagian hartanya melalui zakat, infak, sedekah, hibah, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya berfungsi sebagai sarana pemerataan. Melalui mekanisme tersebut, mampu membantu kelompok yang kurang mampu, sehingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan. Temuan ini didukung oleh penelitian (Defrilia et al., 2025) yang mengemukakan zakat adalah instrumen ekonomi Islam yang berpotensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui mekanisme distribusi kekayaan yang lebih adil kepada pihak masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, implementasi nilai Ihsan dalam aktivitas ekonomi dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen vital untuk mewujudkan keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan.

Dalam ekonomi Islam, terdapat pula konsep Ujrah al-Mithl yang memiliki urgensi signifikan, yakni pemberian upah yang pantas dan sepadan dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang pekerja. Islam memandang bahwa setiap pekerja berhak memperoleh imbalan yang adil sebagai bentuk penghormatan terhadap tenaga, waktu, serta keterampilan yang telah dicurahkan. (R. C. Putri et al., 2023) mengemukakan bahwa konsep ujrah dalam Islam tidak semata-mata berkaitan dengan pembayaran upah, melainkan juga merepresentasikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja agar mereka mampu hidup secara layak dan bermartabat. Apabila upah yang diterima pekerja terlalu rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kemiskinan serta memperlebar kesenjangan pendapatan. Oleh hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh (Lutfi & Efriadi, 2023), konsep *Ujrah al-Mithl* dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, sehingga kesejahteraan pekerja dapat terpelihara dan distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Konsep Kesejahteraan (*Falah*)

Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan adanya pengembangan dalam ekonomi tidak semata-mata berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan pada pencapaian falah, yakni suatu kondisi kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan serta pencapaian dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Konsep falah menekankan bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur semata-mata dari pemenuhan kebutuhan material, melainkan harus meliputi aspek spiritual, moral, dan sosial. Falah merupakan suatu konsep kesejahteraan yang memadukan dimensi material dan spiritual, sehingga keberhasilan hidup seseorang tidak semata-mata dinilai dari tingkat kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Pandangan tersebut relevan dengan pendapat (Suardi, 2021) yang menyatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya terkait dengan kondisi ekonomi, tetapi juga meliputi terpenuhinya nilai-nilai moral, keagamaan, serta kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

Menurut prinsip ekonomi dalam Islam, kesejahteraan yang hakiki hanya dapat dicapai ketika pertumbuhan ekonomi disertai dengan distribusi pendapatan yang adil serta merata. Setiap perseorangan harus mempunyai akses yang sama dalam memperoleh pekerjaan, menjalankan bisnis, dan merasakan keuntungan dari perkembangan ekonomi. Jika ketimpangan pendapatan masih tinggi, itu menandakan bahwa hasil dari pembangunan belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara merata. (Zein et al., 2024) mengungkapkan bahwa falah mencerminkan suatu kondisi kesejahteraan yang dibangun atas dasar keadilan sosial, distribusi ekonomi yang merata, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam masyarakat. Pandangan ini dipertegas oleh pernyataan (Kumaidi et al., 2025) dimana konsep falah memerlukan adanya pembangunan yang inklusif agar keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua segmen masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, pemerataan distribusi pendapatan menjadi bagian terpenting dalam mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Menurut Umer Chapra, terdapat beberapa prinsip dasar ekonomi islam, diantaranya (Amin, n.d.):

Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan landasan keyakinan bagi ajaran agama Islam. Konsep tersebut menegaskan bahwa semua hal yang terjadi telah diatur dan dibentuk oleh Allah SWT dengan sengaja, tidak sebagai akibat dari kebetulan saja, serta setiap sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Maksud tersebut memberi arti penting bagi eksistensi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya..

Prinsip Khalifah

Di bumi, manusia berkedudukan sebagai khalifah Allah SWT, yang dianugerahi dengan potensi jasmani dan rohani untuk menjalankan perannya sebagai wakil-Nya. Konsep tersebut mengandung sejumlah implikasi mendasar, yaitu: (a) Terjalinnya silaturahmi sesama umat manusia, (b) Mengelola SDA sebagai kewajiban yang harus dijaga, (c) Penerapan pola hidup sederhana setiap hari, serta (d) Manusia bebas berbuat dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Prinsip keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama dari ajaran islam, yang mengandung sejumlah implikasi penting, yaitu: (a) Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia agar bisa hidup layak, (b) Sumber pendapatan yang diperoleh bersifat halal dan tayyib, (c) Pendapatan dan kekayaan perlu didistribusikan secara merata untuk mencegah ketimpangan yang berlebihan, (d) Ekonomi perlu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil untuk mencapai target yang diinginkan.

Keterkaitan PDRB terhadap Gini Ratio

PDRB adalah suatu bagian perekonomian yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu wilayah dapat memproduksi produk dan layanan dalam rentang waktu tertentu. Kenaikan PDRB biasanya menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di wilayah tersebut turut mengalami perkembangan. Pertumbuhan ekonomi yang direfleksikan melalui kenaikan PDRB dapat mendorong peningkatan investasi, perluasan kegiatan usaha, serta terciptanya kesempatan kerja baru bagi penduduk. (Astuti, 2023) menjelaskan bahwa PDRB dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kemajuan ekonomi suatu kawasan karena merefleksikan kemampuan daerah dalam menghasilkan output ekonomi. Selain itu, (Wardani & Prabowo, 2025) mengemukakan bahwa peningkatan PDRB pada umumnya diharapkan diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat, asalkan dampak dari pertumbuhan ekonomi itu dirasa mampu akan secara merata seluruh kalangan, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Keterkaitan antara PDRB dan Gini Ratio pada tergantung pada cara distribusi keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Apabila pertumbuhan ekonomi dapat membuka kesempatan kerja secara lebih luas, serta meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, maka tingkat ketimpangan pendapatan cenderung mengalami penurunan. (Kurniasih, 2017) menemukan bahwa peningkatan PDRB dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan apabila hasil dari pertumbuhan perekonomian tersebut bisa dinikmati oleh semua tingkatan masyarakat. Akan tetapi, apabila pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir kelompok atau terpusat pada sektor-sektor tertentu,

kesenjangan pendapatan justru berpotensi semakin melebar. (Dewa & Utomo, 2025) menjelaskan bahwa distribusi kesempatan ekonomi serta struktur ekonomi daerah merupakan faktor penting yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi akan menurunkan atau meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, hubungan antara PDRB dan Gini Ratio dapat bersifat positif maupun negatif, bergantung pada sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat.

Keterkaitan UMK terhadap Gini Ratio

Upah minimum didefinisikan sebagai tingkat penghasilan bulanan terendah yang diterima oleh pekerja dari pemberi kerja atau pengusaha sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan (D. Y. Putri & Aminda, 2024). UMK adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi pendapatan pekerja dan memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang memadai. Penentuan UMK mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi daerah, produktivitas tenaga kerja, dan kebutuhan hidup masyarakat. Keberadaan UMK memberikan standar upah minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, terutama bagi pekerja yang berpenghasilan rendah. (A. S. Putri & Anggraini, 2024) menyatakan bahwa kebijakan upah minimum adalah alat vial dalam ketenagakerjaan yang berperan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah. Oleh karena itu, upah minimum kabupaten/kota sering dianggap sebagai salah satu kebijakan yang dapat memengaruhi distribusi pendapatan di kalangan masyarakat.

Secara teori, kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat berperan dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, karena mampu meningkatkan pendapatan kelompok pekerja yang berada pada strata terbawah dalam distribusi pendapatan. Ketika upah pekerja berpenghasilan rendah naik, kesenjangan pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah cenderung menyempit. (Karimi et al., 2023) mengemukakan bahwa kebijakan upah minimum memiliki hubungan dengan perubahan tingkat ketimpangan pendapatan karena memengaruhi distribusi pendapatan tenaga kerja. (Aprilia et al., 2026) menjelaskan bahwa upah minimum berkaitan dengan tingkat ketimpangan pendapatan sebab perubahan upah minimum dapat memengaruhi distribusi pendapatan tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak pada nilai Gini Ratio suatu wilayah.

3. METODE PENELITIAN

Tujuan dari adanya penelitia ini untuk menganalisis tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui indikator Gini Ratio serta mengkaji hubungannya dengan perkembangan UMK dan laju pertumbuhan PDRB selama periode 2021-2025. Selain itu, tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk menelaah kondisi ketimpangan tersebut berdasarkan perspektif ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan distribusi dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan teknik pendekatan deskriptif dengan data kuantitatif serta memanfaatkan data sekunder yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan. Variabel yang dianalisis meliputi Gini Ratio sebagai indikator ketimpangan pendapatan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai indikator kebijakan pengupahan, serta laju pertumbuhan PDRB sebagai indikator untuk mengetahui kondisi laju ekonomi di daerah. Teknik dalam penelitian yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menampilkan data dalam bentuk tabel ataupun grafik untuk menggambarkan perkembangan masing-masing variabel selama periode penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi pola perubahan Gini Ratio, UMK, dan PDRB serta menggambarkan keterkaitan antarvariabel berdasarkan kecenderungan data yang muncul. Analisis ini digunakan untuk menilai apakah peningkatan UMK dan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan seiring dengan penurunan tingkat kesenjangan perolehan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk memperkuat interpretasi hasil, dilakukan juga menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui jurnal ilmiah, serta sumber-sumber ekonomi Islam yang relevan. Hasil analisis kuantitatif kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif ekonomi Islam dengan merujuk pada prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), serta konsep distribusi kekayaan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini dilakukan tidak hanya menyajikan gambaran empiris mengenai kondisi ketimpangan pendapatan di Yogyakarta, namun juga memberikan analisis normatif mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Gini Ratio di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode pengamatan menunjukkan pola yang berfluktuasi, meskipun secara keseluruhan nilai tersebut masih berada pada kategori menengah ke atas dan relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini secara langsung menunjukkan bahwa penyebaran pendapatan di wilayah DIY

belum secara merata, terlepas dari berbagai upaya peningkatan kesejahteraan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

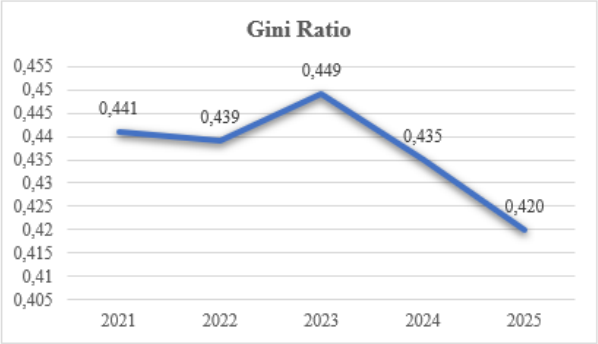
Ketimpangan distribusi pendapatan bisa diketahui sebagai kondisi adanya perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok berpenghasilan tinggi (Anggraini et al., 2024). Ketimpangan pendapatan tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan besar dengan cakupan luas, tetapi juga ditemukan di daerah dengan skala wilayah yang relatif kecil. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang hanya terdiri dari lima wilayah administratif, justru menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang tergolong paling tinggi di Indonesia (Nabila & Laut, 2021). Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun sebagai instrumen kebijakan untuk memperbaiki standar hidup golongan pekerja. Namun demikian, kenaikan UMK tersebut belum secara konsisten diikuti oleh turunnya tingkat ketimpangan yang berarti. Hal ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan pendapatan pada kelompok atas berlangsung lebih cepat dibandingkan kelompok bawah, sehingga kebijakan upah minimum belum mampu menjadi instrumen pemerataan yang optimal. Fenomena ini mencerminkan bahwa ketimpangan pendapatan di DIY bersifat struktural dan multidimensi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komposisi sektor ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan distribusi yang lebih komprehensif, tidak hanya bertumpu pada mekanisme pasar tenaga kerja semata.

Dalam tinjauan ekonomi Islam, kondisi ketimpangan yang masih berlangsung ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam tata kelola ekonomi daerah. Islam secara tegas mendorong pemerataan kekayaan dan melarang penumpukan harta pada segelintir pihak, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, penguatan instrumen distribusi berbasis syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta kebijakan afirmatif yang lebih berpihak kepada kelompok rentan, menjadi bagian penting dari upaya mengatasi ketimpangan secara menyeluruh.

Gini Rasio DIY

Pertumbuhan ekonomi yang stabil, dominasi sektor jasa dan pariwisata, serta tingginya konsumsi rumah tangga menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis di Pulau Jawa. Namun, di balik kondisi tersebut terdapat realitas yang berlawanan, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan yang masih bertahan pada tingkat yang tinggi. Hal ini menunjukkan jika pertumbuhan suatu perekonomian tidak hanya

diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Konsentrasi aktivitas perekonomian di wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta dan Sleman cenderung memperlebar kesenjangan dengan daerah lain seperti Gunungkidul dan Kulon Progo yang relatif tertinggal. Oleh karena itu, untuk memahami kondisi tersebut secara lebih terukur, analisis difokuskan pada perkembangan Gini Ratio DIY selama periode 2021-2025 sebagai indikator utama dalam menilai tingkat ketimpangan pendapatan.



Gambar 1. Grafik Gini Ratio.

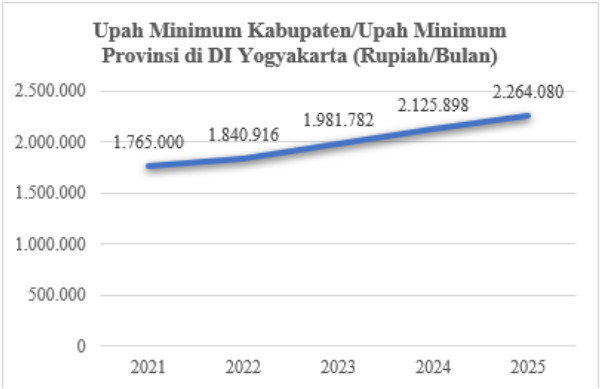
Sumber: Badan Pusat Statistik

Data BPS Provinsi DIY mencatat bahwa Gini Ratio Yogyakarta selama periode 2021-2025 bergerak secara fluktuatif, namun memperlihatkan tendensi penurunan pada penghujung periode pengamatan. Secara rinci, nilai Gini Ratio pada 2021 berada di angka 0,441, sedikit terkoreksi menjadi 0,439 pada 2022, lalu melonjak kembali ke 0,449 pada 2023 sebelum akhirnya turun ke 0,435 pada 2024 dan 0,420 pada 2025. Yang menarik untuk dikritisi adalah adanya fakta bahwa meskipun nilai Gini menunjukkan tren membaik di dua tahun terakhir, seluruh nilai sepanjang periode pengamatan masih bertengger di atas ambang 0,4 dimana batas yang oleh para ekonom umumnya dijadikan penanda ketimpangan kategori sedang-tinggi. Artinya, perbaikan yang terjadi belum dapat dimaknai sebagai resolusi struktural atas persoalan distribusi pendapatan, melainkan sebatas koreksi gradual yang masih sangat rentan berbalik arah.

Lonjakan Gini Ratio pada 2023 menjadi 0,449 perlu mendapat perhatian khusus. Kenaikan ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berlangsung pada tahun tersebut tidak bersifat inklusif, pertumbuhan sering dinikmati oleh pihak berpenghasilan atas, sementara pihak bawah belum mendapat manfaat yang setara. Fenomena ini sejalan dengan tesis pertumbuhan tanpa pemerataan (*growth without equity*) yang kerap terjadi di wilayah dengan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi seperti DIY. Lebih jauh, fluktuasi yang terjadi sepanjang periode ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Yogyakarta bersifat labil dan belum ditopang oleh mekanisme redistribusi ya ng kokoh.

UMK DIY

Pertumbuhan Upah Minimum Kota (UMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terus meningkat menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Namun, kenaikan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan upah minimum tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan.



Gambar 2. Grafik UMK DIY.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data menunjukkan bahwa UMK di DIY menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2021-2025, sebesar Rp1.765.000 pada tahun 2021 dan Rp2.264.080 pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Secara nominal, kenaikan ini berpotensi memperbaiki daya beli masyarakat, khususnya bagi pekerja berupah rendah, namun jika dikaitkan dengan kondisi ketimpangan pendapatan, peningkatan UMK ini belum bisa diikuti dengan penurunan kesenjangan yang relevan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan upah minimum memiliki keterbatasan dalam mengatasi ketimpangan yang bersifat struktural, terutama karena dampaknya lebih banyak dirasakan oleh sektor formal, sementara sebagian masyarakat lainnya masih berada di sektor informal. Dengan demikian, meskipun tren kenaikan UMK menunjukkan arah yang positif, diperlukan kebijakan tambahan yang lebih komprehensif untuk mendorong pemerataan pendapatan secara lebih merata.

Analisis Hubungan Gini Ratio dan UMK DIY

Berdasarkan data yang tersedia, keterkaitan antara Gini Ratio dan Upah Minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2021-2025 menunjukkan pola yang tidak bersifat linear dan cenderung tidak langsung. Di satu sisi, UMK terus mengalami peningkatan setiap tahun sebagai upaya pemerintah dalam mendorong kesejahteraan tenaga kerja. Namun di sisi lain, Gini Ratio justru berfluktuasi-bahkan meningkat pada tahun 2023, sebelum akhirnya

menurun pada dua tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan UMK tidak secara otomatis berimplikasi pada penurunan ketimpangan pendapatan.

Kondisi tersebut menegaskan jika kebijakan upah minimum mempunyai keterbatasan untuk memengaruhi pendistribusian pendapatan secara menyeluruh. Salah satu faktor utamanya adalah struktur ekonomi Yogyakarta yang didominasi sektor jasa dan pariwisata, yang cenderung menghasilkan pendistribusian pendapatan yang kurang merata dalam sesama pelaku ekonomi. Selain itu, kesenjangan antara sektor formal dan informal juga berperan signifikan, mengingat kebijakan UMK hanya berlaku bagi pekerja formal, sementara sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal yang tidak tersentuh kebijakan tersebut. Selain itu, adanya tingkat akses yang berbeda terhadap sumber daya ekonomi seperti pendidikan, modal, dan peluang usaha semakin memperlebar ketimpangan di masyarakat. Secara deskriptif, meskipun terjadi penurunan Gini Ratio pada akhir periode pengamatan, hal tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung sebagai dampak dari kenaikan UMK, melainkan lebih dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang membentuk pendistribusian pendapatan. Maka dari itu, hubungan UMK dan Gini Ratio di Yogyakarta dapat dikatakan tidak signifikan secara langsung, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan menyasar aspek struktural guna mengurangi ketimpangan secara lebih efektif.

Analisis Hubungan PDRB terhadap Gini Ratio dan UMK

PDRB dianalisis dalam penelitian ini karena berfungsi sebagai indikator utama dalam mengukur kinerja dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat digunakan untuk menilai apakah peningkatan aktivitas ekonomi di Yogyakarta turut mendorong pemerataan kesejahteraan atau justru memperlebar ketimpangan distribusi pendapatan.



Gambar 3. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB DIY.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB DIY relatif stabil namun sempat melambat sebelum kembali meningkat pada 2025. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan UMK

meningkat, ketimpangan pendapatan masih terjadi, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan secara keseluruhan belum inklusif dan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Analisis hubungan antara Gini Ratio, UMK, dan PDRB menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sebagai indikator pergerakan perekonomian tidak hanya bisa diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Meskipun PDRB dan UMK cenderung meningkat, Gini Ratio masih berfluktuasi, yang mengindikasikan jika manfaat pertumbuhan suatu perekonomian belum tersebar secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan UMK dan pertumbuhan suatu perekonomian sering diperoleh pihak tertentu saja, sehingga hubungan antarvariabel bersifat tidak langsung dan belum mampu secara signifikan menekan ketimpangan.

Analisis Ketimpangan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesenjangan pendistribusian suatu pendapatan tercermin dari tingkat Gini Ratio di Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa pengamatan 2021-2025 menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren penurunan pada akhir periode, tingkat ketimpangan masih berada pada kategori menengah ke atas. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini dapat dianalisis melalui pada prinsip utama misalnya keadilan distribusi (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), serta larangan penumpukan harta pada kelompok tertentu. Konsep keadilan distribusi (*al-'adl*) dalam Islam menegaskan jika kekayaan seharusnya tidak beredar hanya pada kelompok tertentu, melainkan harus terdistribusi secara merata di masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ ٧

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat tersebutsebagai dasar normatif yang menegaskan terkait prinsip ekonomi harus mampu menciptakan pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan. Dalam konteks Yogyakarta, nilai gini ratio tercatat di atas 0,4 mengindikasikan distribusi pendapatan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan tersebut, sehingga masih terdapat konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.

Konsep keseimbangan (*tawazun*) menekankan pentingnya harmoni diantara keperluan perseorangan dan keperluan sosial. Di ekonomi islam, keselarasan ini diwujudkan melalui mekanisme distribusi yang adil, yang pada akhirnya tidak adanya ketimpangan yang singinikan antara kelompok kaya dan miskin. Namun, data empiris menunjukkan bahwa meskipun UMK mengalami peningkatan, ketimpangan tetap bertahan. Dengan ini memperlihatkan jika keseimbangan perekonomian belum tercapai secara optimal, karena peningkatan kesejahteraan belum dimiliki dengan merata bagi seluruh tingkatan masyarakat. Selain itu, Islam juga secara tegas melarang penumpukan harta (*iktinaz*), yaitu akumulasi kekayaan yang tidak didistribusikan kepada masyarakat. Larangan ini tercermin dalam QS. At-Taubah ayat 34-35 yang mengkritik perilaku menimbun harta tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ ٣٤ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ٣٥

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah [9]: 34-35).

Dalam konteks ketimpangan di Yogyakarta, fenomena ini dapat dikaitkan dengan adanya kelompok ekonomi tertentu yang memperoleh manfaat lebih besar dari pertumbuhan ekonomi, sementara kelompok lainnya tertinggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi kekayaan belum berjalan secara optimal. Dalam Hadist, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan kepedulian terhadap kelompok lemah, salah satunya melalui kewajiban zakat serta anjuran infak dan sedekah. Berbagai instrumen tersebut memiliki fungsi antara lain untuk pendistribusian kekayaan dalam Islam. Jika diimplementasikan secara optimal, instrumen ini dapat menjadi solusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di Yogyakarta saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Meskipun terdapat upaya perbaikan melalui kebijakan seperti peningkatan UMK, hal tersebut belum cukup untuk mewujudkan keadilan distribusi

secara menyeluruh. Islam melihat kekayaan adalah amanah yang wajib dimanfaatkan secara adil dan proporsional, dengan mempertahankan keselarasan antara hak perseorangan dan keperluan masyarakat secara keseluruhan (Trisnawati et al., 2026).

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat ketimpangan pendistribusian suatu pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama masa pengamatan 2021-2025 masih tergolong relatif tinggi meskipun menunjukkan kecenderungan menurun pada akhir periode pengamatan. Nilai Gini Ratio yang secara konsisten berada di atas 0,40 menunjukkan jika pendistribusian pertumbuhan perekonomian belum sepenuhnya terlaksana dengan rata penyebarannya kepada seluruh tingkatan masyarakat. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang terjadi setiap tahun serta pertumbuhan PDRB yang terlihat stabil belum mampu secara langsung menurunkan tingkat kesenjangan upah. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan jika pertumbuhan perekonomian dan kebijakan pengupahan belum sepenuhnya memiliki sifat inklusif karena terdapat kesenjangan akses terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, modal, dan sumber daya produktif di masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan distribusi (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kesejahteraan (*falah*) belum terwujud secara optimal, sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mempertahankan hasil pembangunan perekonomian yang bisa dirasakan dengan merata oleh seluruh pihak di masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan melalui perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kualitas SDM, pemberdayaan sektor informal, serta penguatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kegiatan ekonomi produktif. Selain itu, optimalisasi instrumen distribusi ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dapat menjadi alternatif dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan karena menggunakan teknik pendekatan deskriptif dengan cakupan variabel yang terbatas pada Gini Ratio, UMK, dan PDRB selama periode 2021-2025. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan teknik metode analisis yang lebih mendalam serta menambahkan variabel lainnya seperti contohnya tingkat kemiskinan, pendidikan, pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan efektivitas instrumen ekonomi Islam agar memperoleh pemahaman yang bisa lebih komprehensif mengenai faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR REFERENSI

Amin, D. (n.d.). *PEMERATAAN DAN KEADILAN EKONOMI DI INDONESIA (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)*. *05*(01), 1–17.

Ananda, R., Aseri, A. F., & Hafidzi, A. (2025). *KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI SYARIAH : STUDI QS . AL-HASYR AYAT 7 TERHADAP KEBIJAKAN*. *9*(1), 91–103.

Andrianto, B., & Setyowati, E. (2025). *Income Distribution Inequality In Central Java 2020 – 2024 : A Panel Data Analysis Of The Role Of Economic Growth , Education , Unemployment , And Wages Ketimpangan Distribusi Pendapatan Jawa Tengah 2020 – 2024 : Analisis Panel Data Atas*. *6*(6), 775–785.

Anggraini, N., Santosa, P. B., & Citaningati, P. R. (2024). *Pengaruh Islamic Human Development Index , Pengangguran , Ketimpangan Pendapatan , dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022)*. *10*(03), 3143–3153.

Angraeni, M., & Saiful, M. (2025). *Analisis Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat*. *1*(3), 82–90.

Aprilia, D., Rifan, D. F., & Rahman, T. (2026). *DETERMINATION OF THE GINI RATIO IN INDONESIA IN 2020 – 2024 : A PANEL DATA STUDY OF 10 PROVINCES*. *9*(1), 123–137.

Ardiani, D. R., & Prabowo, P. S. (2024). *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan*. *4*, 52–62.

Asman, J. R., Arham, M. A., & Akib, F. H. Y. (2024). *ANALISIS PENGARUH STRUKTUR EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SULAWESI*. *1*(3), 76–83.

Astuti, D. (2023). *Analisis Pengaruh PDRB , IPM Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kalimantan Tengah*. *3*(2).

Ayu, K., & Suryadi, N. (2025). *Filsafat Distribusi dalam Ekonomi Islam : Tijauan Normatif*. *9*, 16101–16106.

Daffa, M., & Wahyu, T. (2024). *ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2019*. *13*(2), 27–40.

Defrilia, A., Revanata, L., Bela, A. T. S., Firdaus, M. R., & Hidayati, A. N. (2025). *Peran strategis zakat dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan*. *01*(01), 574–589.

Dewa, P. K., & Utomo, Y. P. (2025). *Analysis of the determinants of income inequality in java island province 2018-2023 analisis determinan ketimpangan pendapatan provinsi pulau jawa 2018-2023*. *8*, 5055–5068.

Fatihurroyyan, L. M., & Wildana, M. D. A. (2024). *ANALISIS PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA*. *3*(3), 967–975.

Fatonah, A. A., & Sebayang, A. F. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia , Dana Alokasi Umum , dan Angkatan Kerja*. 87–96.

Hakami, M. E. (2024). *Economics , Finance , and Business Review Pengaruh sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakara*. *1*(1), 36–

46.

Jalianty, S., Syta, K. Z., Saputra, N., Niarno, R. A., & Masrur, M. (2026). *Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer*. *2*(1), 1198–1212.

Karimi, K., Mulyani, P., Murialti, N., & Tibrani. (2023). *The Influence of Foreign Investment, Corruption Perception Index, Poverty, Unemployment and Minimum Wage on Income Inequality in Indonesia*. *13*(1). https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4775

Karimullah, S. S. (2025). *Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Islam*. *5*(1), 55–81.

Khoiri, A. Z., Pahlawan, E. R., & Samara, F. H. (2020). *Ketimpangan Pendapatan di Indonesia : Pendekatan Data Panel 2016-2020 Income Inequality in Indonesia : A Panel Data Approach 2016-2020*.

Kumaidi, Iska, S., & Saskia, A. (2025). *Rekonstruksi Konsep Falah dalam Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Sintesis antara Tafsir Kontemporer, Psikologi Positif, dan Teori Pembangunan Inklusif*. *11*(06), 105–119.

Kurniasih, E. P. (2017). *Economic Journal of Emerging Markets*. *9*(October), 181–188. https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art7

Lutfi, H. A., & Efriadi. (2023). *UPAH (UJRAH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. *13*(Desember), 33–51.

Makipantung, R. O., Walewangko, E. N., & Niode, A. O. (2023). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA*. *23*(7), 157–168.

Maulidya, D., Hilmansyah, M., & Azzahra, H. S. (2025). *Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *1*(2), 229–236.

Nabila, L. M., & Laut, L. T. (2021). *DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2012-2020*. *3*(8).

Putri, A. S., & Anggraini, S. (2024). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KOTA TANJUNGPINANG*. *7*(2).

Putri, D. Y., & Aminda, R. S. (2024). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. *3*(1), 87–108.

Putri, R. C., Tarigan, A. A., Samri, Y., Nasution, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Islam, U., Suamatera, N., Ekonomi, F., Bisnis, D., Islam, U., Suamatera, N., Ekonomi, F., Bisnis, D., Islam, U., & Suamatera, N. (2023). *ANALSISIS KONSEP AL- UJRAH (UPAH) DALAM EKONOMI ISLAM : PENDEKATAN*. *9*(01), 1–8.

Rasyidi, F., & Soesilo, A. M. (2021). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2019*. *21*(1), 12–17.

Rosaline, M., Setya, T., & Tohirin, A. (2024). *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini , Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2023*. *3*(2), 227–234.

https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art13

Sholikah, N. R., & Imaningsih, N. (2022). *PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. *10*(3), 247–253.

Suardi, D. (2021). *MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM*. *6*, 321–334.

Taufiq, M., Melidiana, M., Sasmita, J. E., & Bintani, L. (2025). *Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Klasik Dan Islam Pada Ekonomi Modern*.

Trisnawati, L., Bashiroh, N. N., & Adlan, M. A. (2026). *Keadilan Distribusi Ekonomi pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab : Refleksi atas Ketimpangan Ekonomi di Indonesia*. *6*(1), 242–251.

Wardani, S. A., & Prabowo, P. S. (2025). *Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Kaltim Tahun 2014–2023*. *5*, 166–183.

Yusuf, A. A., Anglingkusumo, R., & Sumner, A. (2021). *A direct test of Kuznets in a developing economy : a cross-district analysis of structural transformation and inequality in Indonesia A direct test of Kuznets in a developing economy : a cross-district analysis of structural transformation*. *1376*. https://doi.org/10.1080/21681376.2021.1924850

Zein, A. W., Anggraini, D., Indri, H., Harahap, Y., Sabrina, T. W., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *FALAH SEBAGAI TUJUAN AKHIR DALAM EKONOMI ISLAM : PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN DUNIA DAN*. *3*, 132–142.

Zuraidah. (2013). *PENERAPAN KONSEP MORAL DAN ETIKA DALAM*. *XIII*(1), 137–153.